

## PENANGANAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR (*NON PERFORMING LOAN*) PASKA PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PEDESAAN

Siti Nuraini<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this research to looking for handling problems after the implementation of PNPM Mandiri Rural especially for arrears (non performing loan ) revolving funds that has become asset the community. For the first time, monitoring and evaluation originally carried out by the external but after the program is will be by the community. This research used methodology qualitative to technique observation, interviews and focuss group discussion (FGD). This result indicates that the development of asset revolving funds activity management units (UPK) is 56 %. Arrears revolving funds accidents was at the beginning of the program because the weak of institutional and monitoring to the beneficiaries. Handling arrears (non performing loan ) should be conducted in a family spirit have not yet decided to the police. This advice especially to the local government is to supervision and strengthening institutional owned by the activity management units (UPK) because revolving funds managed quite large and gave benefits received by the public is also quite a lot*

**Keyword :** *Activity management units (UPK), arrears, revolving funds*

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received 15 August 2016

Accepted 23 October 2016

Availabe online 25 November 2016

### 1. Pendahuluan

Kebijakan peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan MDG's di tahun 2015 dengan membuat program-program pembangunan manusia, yang didanai oleh dana APBN, APBD maupun bantuan lembaga donor. Tujuan program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pendidikan ataupun kesehatan, menurunkan kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan manusia yang berkelanjutan dapat tetap berjalan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals.

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga dibarengi dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik

<sup>1</sup> Corresponding author : Dosen PDD Universitas Airlangga, Jl. Wijaya Kusuma, No. 113 Banyuwangi.  
Telp. (0333) 417788, 081575115759.  
Email : [sitinuraini@feb.unair.ac.id](mailto:sitinuraini@feb.unair.ac.id)

pusat maupun daerah. Strategi dasar yang telah ditetapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis Community Driven Development (CDD) yang diterapkan mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 yang memiliki alokasi dana cukup besar yang dialokasikan untuk seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri (worldbank, 2015).

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri meliputi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman (jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi), sosial (air bersih, sanitasi, MCK), pendidikan (sarana pendidikan, beasiswa, peralatan pendidikan), kesehatan (sarana kesehatan, makanan tambahan balita) dan ekonomi secara padat karya; penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan yang berakhir pada tahun 2015 meninggalkan asset-aset produktif maupun asset infrastruktur di masyarakat. Infrastruktur yang telah dibangun oleh program merupakan asset yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat arena termasuk sebagai salah satu bagian dari fasilitas umum, begitu pula dengan asset produktif berupa dana bergulir. Pengelolaan dana bergulir tetap dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sampai dengan saat ini. Permasalahan pengelolaan dana bergulir salah satunya adalah tunggakan atau *non performing loan* oleh masyarakat. Untuk itulah penelitian ini akan melihat bagaimana penanganan unit pengelola kegiatan (UPK) dalam menanggulangi tunggakan atau *non performing loan* paska pelaksanaan program.

## 2. Kerangka Teoritis

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan : a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat

b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat (TNP2K, 2014).

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun yang menjadi tujuan khususnya adalah meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja masyarakat miskin, meningkatkan kapasitas kelembagaan, penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*), meningkatkan sinergi pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Meningkatkan modal social yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya dan peningkatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (TNP2K, 2014).

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi : penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman (jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi), sosial (air bersih, sanitasi, MCK), pendidikan (sarana pendidikan, beasiswa, peralatan pendidikan), kesehatan (sarana kesehatan, makanan tambahan balita) dan ekonomi secara padat karya; penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin terutama bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia; peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik (pnpm-mandiri, 2014).

Kemiskinan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu (Ritonga, 2011). Atau kondisi absolut atau relatif seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah karena sebab-sebab natural, kultural atau struktural yang menyebabkan ia tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat (Nugroho dan Dahuri, 2012).

Jeffrey Sach menyatakan bahwa situasi kemiskinan ditandai dengan tiadanya enam modal yaitu: (1) *Human Capital* (kesehatan, pendidikan, nutrisi), (2) Modal usaha, (3) Infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi), (4) Modal alam, (5) Administrasi publik yang dikelola baik, (6) Modal pengetahuan (Sama'i et.al). Sedangkan World Bank (2004) dalam Santoso (2011) mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya di bawah garis tertentu, seperti dibawah \$1 atau \$2 per hari, atau di bawah level yang ditetapkan masing-masing negara.

Menurut World Bank (2012), terdapat lima sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang telah dilakukan oleh berbagai Kementrian dan Lembaga. Program tersebut meliputi: Konsumsi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Consumption and Basic Needs*, Pendidikan, Pengangguran dan Pelatihan (*Education, Employment and Training*), Kesehatan (*Health*),

Infrastruktur (*Infrastructure*), Kredit Mikro untuk Wirausaha (*Microcredit for Entrepreneurship*).

Istilah *empowerment* memiliki banyak penafsiran. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan merupakan kompetensi kerakyatan, melek sosiopolitik dan kompetensi partisipasi (Ife, 1995; Rappaport, 1984; Kiefer, 1981 dalam Fahrudin).

Suharto dalam Ritonga (2011) dan Adiyoso (2009) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Robert Dahl berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan kekuatan yang mampu mempengaruhi pelaku lain untuk bertindak yang sebenarnya tidak diinginkannya, oleh karenanya pemberdayaan kerap dinilai sebagai usaha memberi 'daya' kepada pihak lain untuk bertindak. Pemberdayaan kerap dilihat sebagai sebagai persamaan tindakan untuk memperoleh kekuatan melakukan sesuatu (Sachari, 2011).

Menurut Sachari (2011) dan Suryono (2006) pemberdayaan mengandung makna sebagai reaksi balik atas fenomena ketidakberdayaan menghadapi sebuah kekuatan besar yang telah menjadi sebuah wacana, mengatasi adanya rasa impotensial-emosional dan sosial dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri. Fenomena ketidakberdayaan ini muncul sebagai 'suara' ketidakpuasan dan kesadaran terhadap penindasan, pelecehan, peniadaan, perendahan, pengecilan arti, terhadap suatu tatanan minoritas, yaitu mereka yang tidak berdaya, mereka yang terbelakang ataupun mereka yang tersisihkan.

Proses pemberdayaan akan mempengaruhi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengontrol, dan terlibat setiap proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Strategi pemberdayaan masyarakat sebagai penunjang proses pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi: (1) Peningkatan kapasitas individu dan kelompok, (2) Pengakuan dan penghargaan nilai-nilai, (3) Keanekaragaman, (4) Partisipasi, (5) Hak asasi dan keadilan, (6) Lingkungan yang kondusif, (7) Keberpihakan (Adiyoso, 2009).

Strategi pengembangan masyarakat diperuntukkan bagi usaha membantu pengembangan masyarakat yang masih terbelakang bahkan primitif. *Community Development* merupakan suatu proses yang merupakan usaha masyarakat yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas. Unsur yang diharapkan saling mendukung adalah partisipasi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya sedapat mungkin atas prakarsa sendiri dan pelayanan teknis atas bentuk pelayanan lain untuk mendorong prakarsa dan partisipasi (Soetomo, 2010).

Program pembangunan masyarakat bukan hanya sekedar sebuah proyek, tetapi lebih dari itu memerlukan transformasi mendalam dari struktur-struktur politik dan administratif yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok dan

komunitas serta pemerintah setempat dengan sumberdaya dan kekuasaan untuk menggunakannya dengan lebih flexible dan berkelanjutan, sehingga mereka mampu mengatur pembangunan yang ada di daerah mereka (Biswanger-Mkhize, 2010 dalam Utomo, 2013).

### **3. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pertimbangan karena berhadapan dengan kenyataan ganda yang menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dengan pola-pola nilai yang. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir (Suyanto dan Sutinah, 2007).

Fokus penelitian ini adalah masyarakat penerima hasil program PNPM Mandiri Pedesaan dan pemanfaat dan kelompok penerima bantuan simpan pinjam khusus perempuan secara langsung program tersebut paska berakhir di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan subyek dan sumber informasi dalam penelitian ini adalah pelaku kelembagaan PNPM Mandiri Pedesaan tingkat kecamatan dan Pemanfaat dan kelompok penerima simpan pinjam khusus perempuan.

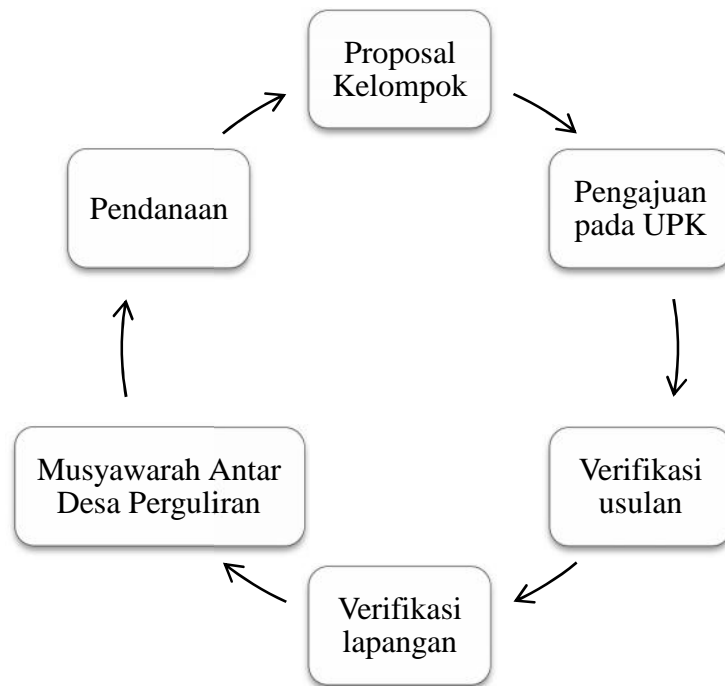
### **4. Hasil dan Pembahasan**

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah Kementrian Dalam Negeri sedangkan di daerah di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu di Jawa Timur yang mendapatkan alokasi dana program PNPM Mandiri Kecamatan sejak tahun 2007. Salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Licin. Kecamatan Licin mulai melaksanakan program PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2009, dengan program utama pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat dan simpan pinjam khusus perempuan. Pada tahun 2009 dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh kecamatan Licin sebesar 3 milyar rupiah dengan komposisi 80% dana APBN dan 20% dana APBD. Pada tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan jumlah dana BLM yang diterima oleh kecamatan Licin yaitu hanya sebesar 1,5 milyar rupiah. Pada tahun 2012 alokasi dana BLM yang diterima oleh kecamatan Licin sebesar Rp. 900.000.000,-. Tahun 2013 dana yang diterima kembali berkurang sebesar 200 juta sehingga total alokasi dana PNPM Mandiri pada tahun tersebut adalah Rp. 700.000.000,-. Akhir tahun pelaksanaan program dana yang diterima hanya sebesar Rp. 600.000.000,-. Beberapa penyebab penurunan alokasi dana PNPM Mandiri karena turunnya angka kemiskinan atau sanksi program karena kecamatan bermasalah. Selain itu, diharapkan dana program merupakan salah satu stimulus agar masyarakat mampu mengembangkan aset-aset yang telah dihasilkan dari pelaksanaan program.

Paska pelaksanaan program PNPM Mandiri, dana bergulir yang masih dikelola oleh UPK juga menggunakan sistem perencanaan partisipatif dengan tetap megutamakan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian adalah observasi, wawancara dan *focus group discussion (FGD)* kepada para pelaku program PNPM Mandiri dan kelembagaan yang terbentuk selama program berlangsung. Dalam penelitian ini, responden yang digunakan adalah sampel anggota kelompok simpan pinjam khusus perempuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Licin. Sedangkan untuk narasumber adalah anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK), anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan anggota Badan Pengawas UPK (BP-UPK).

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 jumlah kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di kecamatan Licin terdapat 60 ( enam puluh) kelompok dengan jumlah pemanfaat sebanyak 5.241 orang. Modal awal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 1.300.000.000,- dengan perkembangan dana sebesar 56% pada akhir bulan Agustus 2016 atau sebesar Rp. 730.605.604,- . Perencanaan keuangan, pelaksanaan perguliran dan kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) masih tetap mengacu pada petunjuk teknis operasional kegiatan PNPM Mandiri.

Setelah berakhirnya pelaksanaan program pada akhir tahun 2014, asset dana bergulir yang telah ada di masyarakat tetap dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai salah satu asset pendanaan mikro bagi masyarakat terutama yang tidak memiliki akses kepada perbankan. Sistem perguliran dana masih mengacu pada ketentuan program yaitu diutamakan untuk masyarakat miskin dan tidak memiliki akses pada perbankan sehingga mampu mengurangi rentenir yang ada di desa-desa. Dengan jasa yang cukup kecil sebesar 1,5% setahun dan maksimal pinjaman untuk masing-masing pemanfaat sebesar Rp. 6.000.000,- sangat ringan untuk pemanfaat melakukan pengembalian dana. Selain itu syarat pinjaman hanya melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) juga tanpa adanya jaminan atau agunan hanya ada berdasarkan sistem tanggung renteng dan *moral punishment* yang berlaku di masyarakat. *Moral punishment* ini dilaksanakan kepada seluruh kelompok yang memiliki tunggakan sampai dengan kolektibilitas 5 atau tunggakan diatas enam bulan, berupa kelompok yang termasuk kategori bermasalah tidak dapat melakukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Alur pelaksanaan perguliran dana dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 1. Alur Perguliran Dana

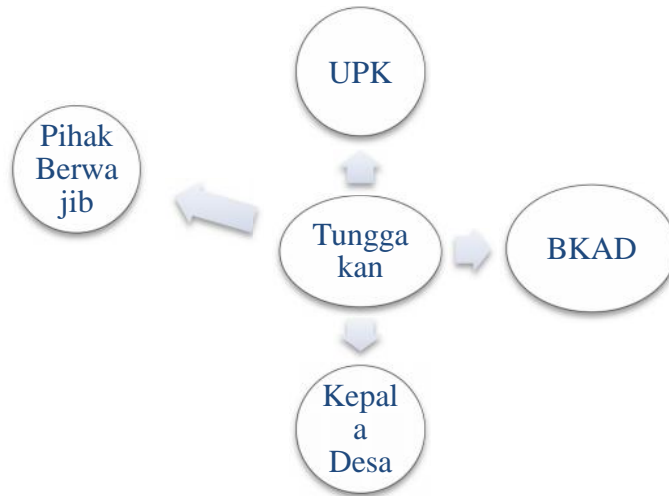
Tahap pertama yang dilakukan oleh kelompok pemanfaat adalah membuat pengajuan proposal kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang diketahui oleh Kepala desa. Setelah pengajuan proposal pinjaman kepada Unit pengelola kegiatan (UPK) maka akan dibuat rekap pengajuan pinjaman dan dilakukan verifikasi administrasi oleh tim verifikasi. Tim verifikasi menerima laporan dari UPK tentang latar belakang kelompok yang sudah pernah melakukan pinjaman ataupun kelompok baru. Setelah dilakukan verifikasi administrasi maka tim verifikasi akan melakukan verifikasi lapangan yaitu kunjungan ke desa-desa untuk menemui kelompok pemanfaat dan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing pemanfaat.

Setelah dilaksanakannya verifikasi lapangan maka dilaksanakan musyawarah antar desa perguliran yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dihadiri oleh Unit pengelola kegiatan (UPK), Badan Pengawas (BP-UPK), tim pendanaan, tim verifikasi dan perwakilan kelompok. Musyawarah perguliran ini merupakan forum untuk menentukan pendanaan yang diterima oleh anggota dan kelompok pemanfaat. Setelah pelaksanaan musyawarah perguliran maka UPK melakukan jadwal penyaluran dana perguliran kepada kelompok.

Pengawasan proses dan pelaksanaan dana bergulir dilakukan oleh BP-UPK. Selain melakukan audit terhadap pelaporan keuangan UPK, badan pengawas UPK juga melakukan pengawasan terhadap dana bergulir yang dilakukan UPK. Selain itu pembinaan kelompok dilakukan oleh UPK pada saat pengembalian angsuran setiap bulannya. Pembinaan ini terutama dilakukan untuk menghadapi permasalahan di tingkat kelompok pemanfaat SPP. BP-UPK memiliki agenda audit keuangan UPK setiap bulan di minggu pertama. Sedangkan rapat kelembagaan yang terdiri dari BKAD, BP-UPK dan UPK

memiliki agenda rutin setiap bulannya yang kondisional untuk waktu pelaksanaannya.

Sebagai program yang berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat, metode penanganan masalah yang digunakan oleh UPK juga lebih menggunakan sistem kekeluargaan daripada penanganan secara hukum. Berikut ini adalah skema penanganan permasalahan tunggakan yang dilakukan oleh UPK selama ini.



Gambar. 2. Skema Penanganan Permasalahan Tunggakan

Tunggakan yang terjadi dalam pengembalian dana bergulir akan dilakukan identifikasi oleh UPK untuk permasalahannya, kemudian akan diberikan surat tagihan kepada kelompok. apabila surat tagihan tidak diindahkan maka UPK akan berkoordinasi dengan BKAD untuk meminta kepala desa membantu dalam mengatasi tunggakan di kelompok pemanfaat. Penyelesaian akhir yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak berwajib untuk permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan di tingkat local, tetapi proses ini belum pernah dilakukan karena UPK masih mengedepankan penanganan permasalahan secara kekeluargaan.

Tabel 1. Tunggakan Unit Pengelola Kegiatan per-Agustus 2016

No	Jenis Tunggakan	Jumlah
1	Tunggakan 1-2 angsuran	Rp. 77.346.500,-
2	Tunggakan 3-4 angsuran	Rp. 16.740.000,-
3	Tunggakan 5-6 angsuran	Rp. 14.640.000,-
4	Tunggakan diatas 6 angsuran	Rp. 279.953.500,-
<b>Total Tunggakan</b>		<b>Rp. 388.680.000,-</b>

Sumber : laporan keuangan UPK, diolah

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan tunggakan UPK diatas 6 kali angsuran merupakan tunggakan pada awal tahun pelaksanaan program di tahun 2009



karena terdapat salah satu pemanfaat yang menunggak dan bekerja keluar negeri. Berbagai penyelesaian tunggakan tersebut telah dilakukan tetapi tetap belum membuahkan hasil yang maksimal. Walaupun terdapat ketentuan untuk melakukan penghapusan pinjaman tetapi BKAD bersama UPK tidak melakukan hal tersebut karena apabila dilakukan penghapusan pinjaman akan membuat masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam mengembalikan dana pinjaman.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat masih tetap berlanjut dan dipertahankan sampai dengan saat ini. Pengawasan dan audit secara sederhana yang dilakukan oleh badan pengawas UPK juga menunjukkan bahwa audit bukan hanya dimiliki oleh auditor profesional tetapi juga oleh masyarakat. Pengawasan paska pelaksanaan program hanya dilakukan oleh badan pengawas dan masyarakat secara langsung. Monitoring dari pemerintah daerah masih sangat kurang terutama untuk pengawasan dan penanganan permasalahan tunggakan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Paska pelaksanaan program PNPM Mandiri asset yang dikelola oleh unit pengelola kegiatan (UPK) masih berkembang dan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk dana bergulir. Tunggakan atau *noan performing loan* yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sangat besar sehingga dapat mengganggu pertumbuhan asset produktif. Tunggakan yang cukup besar tersebut terjadi terutama pada awal-awal pelaksanaan program karena kelembagaan belum berfungsi secara maksimal. Penanganan tunggakan yang hanya berbasis kepada kesadaran masyarakat dan penanganan yang bersifat kekeluargaan tanpa adanya penanganan kepada pihak berwajib membuat Tunggakan atau *noan performing loan* sangat tinggi.

Dari hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan terutama kepada pemerintah daerah adalah besarnya potensi dana bergulir yang dimiliki oleh unit pengelola kegiatan sehingga diperlukan pembinaan dan monitoring secara berkala dari pemerintah daerah. Asset produktif yang terus meningkat tetapi tanpa adanya landasan hukum yang jelas bagi pengelola kegiatan atau UPK akan sangat membatasi ruang lingkup UPK, sehingga legalitas dan arah keberlanjutan UPK perlu kiranya dipikirkan secara bersama oleh pemerintah daerah.

### 5.1 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang sangat kecil hanya terbatas pada wilayah satu kecamatan sehingga belum mampu mewakili proses penanganan paska pelaksanaan program yang tersebar diseluruh Indonesia. Diharapkan penelitian yang berikutnya dibuat ruang lingkup yang lebih luas sehingga mampu merepresentasikan hasil pelaksanaan program yang telah berjalan di masyarakat.

### 5.2 Implikasi Kebijakan

Konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh program PNPM Mandiri Pedesaan sangat tepat dilaksanakan untuk masyarakat karena lebih mudah diadaptasi dan lebih mengedepankan rasa kekeluargaan sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan konsep perencanaan di masyarakat. Penanganan

masalah yang terjadi di masyarakat mampu diselesaikan dalam proses dan kondisi di masyarakat.

Konsep ini dapat digunakan untuk mendampingi kebijakan pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan pembangunan di daerah dengan mengembangkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki karena masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Konsep adaptasi pemberdayaan mampu membuat masyarakat membangun daerahnya masing-masing tanpa meninggalkan ciri khas dan kemampuan daerah dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Putra Media Nusantara. Surabaya.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2015. Program PNPM Mandiri. <http://tnp2k.go.id> diakses pada 30 Oktober 2015.

Bagong Suyanto, dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Cetakan 3. Prenada Media Group : Jakarta.

Fahrudin, Adi. Tanpa tahun. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora. Bandung.

Iwan Nugroho, dan Rokhim Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Edisi Revisi. Cetakan 2. LP3ES : Jakarta.

Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Edisi revisi. Cetakan ke-2. LP3ES. Jakarta.

Ritonga, Susilistiawati. 2011. *Analisis Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap Peningkatan Pendapatan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Asahan*. Tesis. Program Sekolah Pascasarjana, dadan. Universitas Sumatra Utara.

Sachari, Agus. 2011. *Desain dan Permasalahan Pembangunan Menjemput Era Perekonomian Kreatif di Masa Depan*. ITB. Bandung.

Santoso, Lukman Adi. 2011. *Pengaruh PNPM dan Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2009)*. Tesis. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Sama'I, Pairan, Joko Mulyono, Edy Burhan Arifin. 2009. Model Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo. *Laporan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional*. Universitas Jember.

Soetomo.2011. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*.Cetakan ke-3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*.Cetakan ke-1.Edisi pertama.UM Press. Malang.

Utomo, Gilang Bayu. 2013. *Analisi Korelasi PNPM Mandiri terhadap Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Jalan di Indonesia*. Laporan Magang. Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

(<http://web.worldbank.org>).

([www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org).)